RENCANA KERJA

KECAMATAN KWADUNGAN

KABUPATEN NGAWI

TAHUN 2025

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN KWADUNGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19, Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);

16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN KWADUNGAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 disusun berpedoman pada:

a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 109

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 109 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.Penyusunan Renja Kerja Perangkat Daerah sebagai penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kwadungan menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kwadungan. Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada :

1. Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Tahun 2021-2026
2. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025
3. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja
4. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025

Perencanaan program kegiatan merupakan hal yang esensial bagi terselenggaranya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kecamatan Kwadungan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan dalam rangka capaian program setiap tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kwadungan Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja PD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kwadungan dengan susunan sebagai berikut :
   Ketua Tim : Camat
   Sekretaris : Sekretaris Camat
   Anggota : Kasubag dan Kasi
   Tim penyusun Renja PD mempunyai tugas :
   - Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi
   - Menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan
2. Orientasi mengenai Renja PD ;
3. Agenda Kerja Tim Penyusunan Renja PD ;
4. Penyiapan data informasi perencanaan Renja PD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kwadungan menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); I-11
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); I-12
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); I-13
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); I-14

28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); I-16

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); I-17
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Proinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor.10);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun.2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.2012 Nomor 19);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi nomor 220);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
49. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 147 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 73 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 73)
50. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan;
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 21)

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan di wilayah Pemerintahan Kecamatan Kwadungan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kwadungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1 (satu) tahun berselang yaitu Tahun 2025. Adapun tujuan Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan pedoman bagi Kecamatan Kwadungan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan selama jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Kwadungan.
2. Merupakan penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan priotitas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kecamatan Kwadungan dengan target dan sasaran yang efesien, efektif dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Renca Kerja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indicator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing PD serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelanggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut yang dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian penjelasan tentang proses bagaimana usulan/kegiatan usulan pemangku kepentingan, Penjelasan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penjelasan mengenai faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta tindak lanjut.

B A B II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Stategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegitan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik atau tahunan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kwadungan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kwadungan Tahun 2024 dan perkiraan target Tahun 2025.

Kinerja Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk evaluasi kinerja ini dikelompokkan dalam indikator Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat dan Dampak yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Kecamatan Kwadungan.

Evaluasi Program Tahun 2023

Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Kwadungan untuk Belanja sebesar Rp. 3.264.325.022,00 termasuk perubahan dengan 4 (Empat) program dan 27 (dua tujuh) Sub Kegiatan Kinerja Kecamatan Kwadungan Tahun 2023 tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dimana hasil persentase yang dicapai oleh masing-masing kegiatan tingkat realisasinya baik.

Persentase pencapaian kinerja masing-masing kegiatan berkisar antara 0% sampai dengan 100% dan setiap tahun sesuai data yang ada mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Kwadungan Tahun 2023 adalah baik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan seringkali ditemukan hambatan dimana ada kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100%. Sesuai penetapan kinerja Tahun 2025 Kecamatan Kwadungan telah memprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selanjutnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024

tertera dalam lampiran tabel 2.1

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Untuk Tahun Anggaran berjalan yaitu Tahun 2024 dengan besar anggaran sebesar Rp.3.440.068.640,00 terdiri dari 4 program 28 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan Tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kwadungan adalah :

Sasaran :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Utama :

1. Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Perangkat Daerah
2. Persentase Pemerintah Desa Dengan Nilai IKM > 80
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Jenis Pelayanan :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Adapun upaya untuk mencapai sasaran Kecamatan Kwadungan Tahun 2025 merencanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja tersaji dalam table 2.2 pada lembar lampiran.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kwadungan

Tingkat capaian kinerja pelayanan di kantor Kecamatan Kwadungan tahun 2023 dengan Indikator Kinerja Utama yang telah disebut di atas sesuai dengan hasil yang telah diperoleh yaitu :

1. Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Perangkat Daerah 86,90
2. Persentase Pemerintah Desa Dengan Nilai IKM > 80 sebesar 42.86 %
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan sebesar 81,96

Melihat capaian kinerja diatas maka kinerja Kecamatan Kwadungan adalah baik. Hal ini karena capaian IKU Kecamatan bisa mencapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Masalah pokok yang dihadapi Kecamatan Kwadungan adalah belum optimalnya pelayanan yang diberikan yang berdampak pada minimnya kualitas pelayanan desa. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kwadungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kwadungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya berakibat juga pada tingkat pencapaian terhadap visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Melihat pada permasalahan dan hambatan di atas, maka diperlukan kerja yang lebih keras bagi perangkat daerah untuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Diperlukan lebih banyak sosialisasi ataupun penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah. Koordinasi dan sinergi dengan perangkat desa maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Kwadungan demi tersampaikannya layanan dan informasi kepada masyarakat juga perlu lebih ditingkatkan.

2.3.4 Rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

Melihat permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kwadungan, maka diperlukan suatu formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. Pembinaan SDM Perangkat Desa
2. Fasilitasi penyusunan SOP Pelayanan Desa
3. Koordinasi dan fasilitasi antara kecamatan dengan desa dalam proses pergantian perangkat desa
4. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi LPPDes
5. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi LPPDes
6. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan RKPDes dan DURKP Desa
7. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan desa dalam pemahaman kewenangan pembangunan di desa
8. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi APBDes
9. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes
10. Koordinasi lintas sektor dalam peningkatan trantibum

11. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
12. Fasilitasi APBDes untuk pemenuhan alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa
13. Koordinasi Intensif internal dan lintas sektor dalam penyelesaian pelayanan kecamatan
14. Monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesos
15. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesos

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dimana tata cara penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Kwadungan Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 disajikan pada tabel 2.4 pada halaman berikut :

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diserap melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan. Musyawarah rencana pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngawi pada musrenbang tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Ngawi.

Masukan/Bahan Musrenbang berasal dari :

- Masukan/bahan musrenbang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan diselaraskan dengan skala prioritas daerah.
- Masukan/bahan musrenbang dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Hasil usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan hasil yang sudah disepakati.
- Masukan/bahan musrenbang dari kecamatan adalah berupa Berita Acara Hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada bulan Februari. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang sudah dimutakhirkan sesuai hasil Berita Acara Musrenbang tingkat Kecamatan dan diselaraskan dengan skala prioritas kegiatan serta sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Ngawi dengan memperhatikan keadaan dan kondisi wilayah Kecamatan Kwadungan. Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan yang didalamnya memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan disusun sebagai konsekuensi dari Rencana Strategis 5 (lima) tahun yang diarahkan untuk mewujudkan suatu pelayanan optimal bagi aparatur dalam rangka pembentukan sumber daya aparatur guna memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidang tugasnya masing-masing dan lebih luasnya kepada masyarakat di Kecamatan Kwadungan agar terbentuk manajemen tatanan pemerintahan yang baik di kecamatan. Dengan demikian program yang nantinya ditingkatkan melalui Rencana Kerja benar-benar diarahkan pada penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan Kecamatan Kwadungan dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5 pada halaman berikut :

B A B III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun yang berdampak positif dan hasilnya relatif dapat dirasakan oleh masyarakat, walaupun perlu ditingkatkan/dioptimalkan terutama dari segi implementasinya. Masyarakat masih merasakan apa yang diusulkan ternyata masih banyak yang belum terealisasi hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah disamping tentunya ada perencanaan yang matang dari tingkat bawah yang menjadi usulan skala prioritasnya, sehingga usulan yang ada benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.

b. Program Raskin (Kebijakan Nasional)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dalam rangka kerangka prioritas untuk fokus kearah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Rencana Kerja PD (Renja PD) mutlak untuk disusun sebagai arah pelaksanaan program selang waktu 1 (satu) tahun dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan Tahun 2023 bertujuan mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Kwadungan yang efesien dan efektif.

Sasaran dalan Rencana Kerja (Renja) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya kegiatan disajikan mengacu mengacu pada program yang telah disusun sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) merupakan rincian sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Dalam komponen kegiatan ditetapkan indikator kinerja kegiatan yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) dan rencana capaiannya (target)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi untuk mendanai. Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dikelola Kantor Kecamatan Kwadungan selama 1 (satu) tahun ke depan antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Kwadungan secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Pengentasan Kemiskinan Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Pusat dengan bersinergi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan Sub Kegiatan
   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

3. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2025, Kecamatan Kwadungan mengusung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Kwadungan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kwadungan Tahun 2025 adalah 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan.
2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kwadungan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kwadungan, yang meliputi semua Desa yang ada di Kecamatan Kwadungan dan juga Kantor Kecamatan Kwadungan sendiri.
3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.699.940.070,25 (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh ribu tujuh puluh rupiah dua puluh lima sen) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
4. Rumusan program dan kegiatan pada Renja 2025 adalah sesuai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kwadungan bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Kwadungan adalah sebagaimana tabel 4.1 pada halaman berikut :

B A B V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2025 pada triwulan satu sampai dengan triwulan empat tahun 2025. Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparat Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Ngawi. Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Kwadungan Tahun 2025.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KWADUNGAN

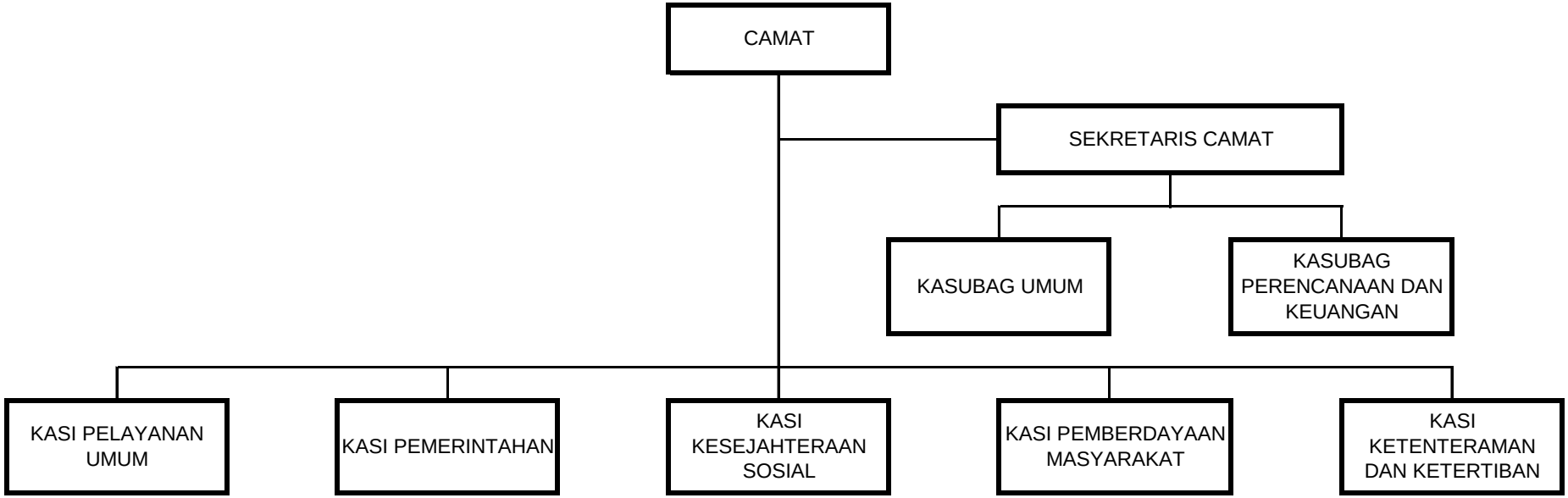

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (n-1/ tahum berjalan)
Kabupaten Ngawi

SKPD : KECAMATAN KWADUNGAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1/ tahum berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023 (n-1/ tahun berjalan)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1/ tahun berjalan)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran OPD yang disusun		11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen		100
						Jumlah Dokumen perencanaan OPD yang disusun		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen		100
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen						9 Dokumen	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen						1 Dokumen	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen						1 Dokumen	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen						2 Dokumen	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen						2 Dokumen	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun	7 Laporan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	7 dokumen	100
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		420 Pegawai	780 Pegawai	780 Pegawai	100	780 Pegawai		
						Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang disusun		26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	100	26 Dokumen		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/ bulan						810 Orang/ bulan	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun		1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan		100
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan						1 Laporan	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun		48 Dokumen	48 Laporan	48 Laporan	100	48 Laporan		100
						Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun		2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	50 Laporan						14 Laporan	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun			100 %	100 %	100	100 %		100
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26 Paket		90 meter	90 meter	100	0 Potong		0

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100 %	100 %	100 %	100	100 %	3 Paket	100
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan yang disediakan		400 Kotak	200 Kotak	200 Kotak	100	400 Kotak	200 Kotak	100
						Jumlah Minuman campur yang disediakan					100	0 Gelas		
						Jumlah Minuman yang disediakan		50 Botol			100	50,00 Botol		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket						2 Paket	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak		224 Meter	69 Meter	69 Meter	100	40,00 Meter		100
						Jumlah Penggandaan		9976 Lembar	7106 Lembar	7106 Lembar	100	9.976 Lembar ,00		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket						3 Paket	
7	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri			54 Kali	54 Kali	100	13,00 Kali		100
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri		13 Kali	24 Kali	24 Kali	100			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Laporan						30 Laporan	
						Jumlah mamin yang disediakan							200 Kotak	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100	0 Unit		
						Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional yang dibeli	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100	0 unit		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang diadakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100	0 Unit		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	1 unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100	0 Unit		100
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100	0 Unit		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim		100 Surat	360 Surat	360 Surat	100	100 Surat		100
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan						25 Laporan	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening air yang dibayar (jml rek x bulan)		12 Rekening	12,00 Rekening	12,00 Rekening	100	12,00 Rekening		
						Jumlah rekening listrik yang dibayar (jml rek x bulan)		24 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	100	24,00 Rekening		
						Jumlah rekening Telepon yang dibayar (jml Rekening x bulan)		12 Rekening	12,00 Rekening	12,00 Rekening	100	12,00 Rekening		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan						60 Laporan	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli		40 Buah	54 Buah	54 Buah	100	40,00 Buah		100
						Jumlah bahan kebersihan yang dibeli		20 Buah	130 Buah	130 Buah	100	28,00 Buah		
						Jumlah pembayaran jasa kebersihan		12 Bulan	12 Kali	12 Kali	100	12,00 Bulan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan						12 Laporan	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honor (Jumlah orang x Bulan)		24 Kali	36 Kali	36 Kali	100	24,00 Kali		100
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan						36 Laporan	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas		4 Kali	7 Unit	7 Unit	100	6,00 Unit		
						Jumlah Kendaraan dinas yang dibayar pajaknya		6 Unit						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit						8 Unit	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		5 Buah	0 Unit	0 Unit	100	5,00 Buah	0 Unit	100
7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bagian gedung yang dipelihara	0 M2		70 M2	70 M2	100	0 M2	70 M2	0
7	01	02	2.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	80,55 %	80 %	80 %	80 %	100		80 %	
7	01	02	2.02		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan					100			
7	01	02	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan yang ditindaklanjuti		14 Kali			100			
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan					100			
						Persentase Desa/Keluaran yang naik Statusnya					100			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	80,55 %	80 %	80 %	80 %	100		80 %	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	02	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monev pelayanan Kecamatan		28 Kali	28 Kali	28 Kali	100		28 Kali	100
						Jumlah peserta sosialisasi		380 Orang	380 Orang	380 Orang	100		380 Orang	
						Jumlah rapat koordinasi peningkatan pelayanan kecamatan		28 Kali	28 Kali	28 Kali	100		28 Kali	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan							
7	01	02	2.04		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat								
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	14 Laporan							
						Jumlah fasilitasi bantuan korban bencana			5 Kali	5 Kali				
						Jumlah fasilitasi bantuan sosial masyarakat			12 Kali	12 Kali				
						Jumlah fasilitasi GSI			3 Kali	3 Kali				
						Jumlah Fasilitasi kampung KB			1 Kali	1 Kali				
						Jumlah Fasilitasi Kecamatan Sehat			2 Kali	2 Kali				
						Jumlah Fasilitasi RTLH			0 Unit	6 Unit				
						Jumlah peserta sosialisasi			456 Orang	456 Orang				
						Jumlah latihan paskibraka yang difasilitasi								
						Jumlah peringatan hari besar/Nasional yang difasilitasi								
						Jumlah RTLH yang ditindaklanjuti								
						Jumlah sosialisasi monitoring koordinasi di tingkat kecamatan dan desa yang dilaksanakan								
						Jumlah dokumen IKM desa yang disusun up to date					100	14,00 Kali	14 dokumen	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					100		5 Laporan	
						Jumlah hasil koordinasi fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan masyarakat desa yang ditindak lanjuti		14 Laporan						

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	1	2	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah kegiatan sosialisasi perizinan di Tingkat kecamatan dan desa yang dilaksanakan		14 Kali			100			
7	01	1	2	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen IKM desa yang disusun up to date					100			
						Jumlah kegiatan sosialisasi non perizinan di tingkat kecamatan dan desa yang dilaksanakan		14 Kali			100			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						100			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						100			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat			24 Kali	24 Kali	100	71,00 %		100
						Jumlah koordinasi lintas sektor terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat			4 Kali	4 Kali	100	1,00 Kali		
						Presentase dokumen Perencanaan Desa/ Kelurahan yang disusun tepat waktu		7,1 %			100			
						Jumlah kegiatan mursenbang kecamatan yang dilaksanakan		1 Kali			100			
						Jumlah monitoring kegiatan pemberdayaan Masyarakat di desa-desa yang dilaksanakan		28 Kali			100			
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan						4 Laporan	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						100			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						100			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan hansip dan Linmas desa yang dilaksanakan					100			
						Jumlah Rakor tentang Ketertiban dan Keamanan Wilayah Kecamatan yang		14 Kali			100			
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						100			
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah hasil koordinasi koordinasi dan pengendalian ketentraman dan wilayah Kecamatan yang dilaksanakan		14 Kali			100			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			71,42 %	71,42 %	100		71,42 %	
						Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasa pemerintahan desa, persentase desa yang menyusun APBDes dan LPPDes tepat waktu			57,14 %	57,14 %	100		57,14 %	
						Persentase desa yang menyusun APBDes dan LPPDes tepat waktu			71,42 %	71,42 %	100		71,42 %	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen SOP Pelayanan Desa yang disusun			% 35,71	% 35,71	100		35,71 %	
						Persentase peserta sosialisasi yang sangat paham terhadap materi sosialisasi			80 %	80 %	100		80 %	
						Persentase laporan hasil fasilitasi pergantian perangkat desa yang di tindaklanjuti			% 35,71	% 35,71	100		35,71 %	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Persentase laporan hasil fasilitasi LPPDes yang ditindak lanjuti			% 71,42	% 71,42	100		71,42 %	
						Persentase laporan kegiatan pelaksanaan Musdes yang ditindaklanjuti			% 71,42	% 71,42	100		71,42 %	
						Persentase laporan hasil Musrenbangcam yang di tindaklanjuti			80 %	80 %	100		80 %	
						Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi RKPDes dan DURKPDes			% 78,57	% 78,57	100		78,57 %	
						Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi APBDes			% 78,57	% 78,57	100		78,57 %	
						Persentase laporan hasil koordinasi Forpimcam yang ditindaklanjuti			80 %	80 %	100		80 %	
						Persentase peserta Paskibraka yang difasilitasi sampai dengan pelaksanaan Upacara HUT RI			75 %	75 %	100		75 %	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah koordinasi dan konsultasi		14 Kali	14 Kali	14 Kali	100			
						Jumlah Rapat Koordinasi		14 Kali	14 Kali	14 Kali	100			
						Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen						1 dokumen	
						Jumlah Laporan Faslitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Kepala Desa							14 Laporan	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Monev yang dilaksanakan			28 Kali	28 Kali	100			
						Jumlah peserta sosialisasi			532 Orang	532 Orang	100			
						Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan tata pemerintahan Desa					100			
						Jumlah Hasil koordinasi , fasilitasi dan pengendalian tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa/ keluarahan yang di tindaklanjuti		14 Laporan						
						Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dokumen						2 dokumen	
						Jumlah Koordinasi monitoring dan evaluasi penjaringan perangkat desa							14 Laporan	
						Jumlah Koordinasi monitoring dan evaluasi penyusunan LPPDes							14 Laporan	
						Jumlah sosialisasi administrasi Pemerintahan Desa							10 Laporan	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah koordinasi dan konsultasi			28 Laporan	28 Laporan	100			
						Jumlah koordinasi lintas sektor terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat			14 Kali	14 Kali	100			
						Jumlah Rapat Koordinasi terkait fasilitasi RKPDes dan DURKPDes			4 Kali	4 Kali	100			
						Jumlah Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Musdes			2 Kali	2 Kali	100			
						Jumlah Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Musrenbangcam			2 Kali	2 Kali	100			
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pemabngunan Desa	2 dokumen						4 dokumen	
						Jumlah Fasilitasi MUSDES							14 Laporan	
						Jumlah fasilitasi RKPDesa dan DURKPDes							14 Laporan	
						Jumlah pelaksanaan Musrenbangcam							1 Laporan	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Kegiatan keagamaan			12 Kali	12 Kali	100			
						Jumlah kegiatan trantib bersama Forkopincam			24 Kali	24 Kali	100			
						Jumlah Koordinasi Forkopincam			2 Kali	2 Kali	100			
						Jumlah Koordinasi forum Keagamaan			2 Kali	2 Kali	100			
						Jumlah pelatihan paskibraka			10 Kali	10 Kali	100			
						Jumlah rapat koordinasi penjaringan paskibraka			2 Kali	2 Kali	100			
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen						1 dokumen	100
						Jumlah Fasilitasi kegiatan paskibraka	6 Laporan						6 Laporan	100
						Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban	10 Laporan						10 Laporan	100
						Jumlah Koordinasi Forkopincam	4 Laporan		2 Kali	2 Kali	100		4 Laporan	100

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KWADUNGAN
KABUPATEN NGAWI

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			82,75	82,80	82,80	82,85	86,90	82,80	82,80	82,85	
2	Presentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN			50%	57,14	64,28%	71,42%	50,00%	57,14%	64,28%	71,42%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			81,50	82,75	83,80	84,80	81,96	82,75	83,80	84,80	

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN NGAWI

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KWADUNGAN

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun**	**100%**	**3.425.068.936,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun**	**100%**	**3.421.700.436,00**	
	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu**	**100%**	**11.500.000**	**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu**	**100%**	**9.950.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9 Dokumen	4.350.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.100.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 Laporan	1.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 Laporan	1.100.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		**Persentase Dokumen dan Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu**	**100%**	**3.049.568.936,00**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**		**Persentase Dokumen dan Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu**	**100%**	**3.048.395.076,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840	3.044.068.936,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840	3.044.995.076,00	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.200.000	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	50 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	50 Laporan	2.200.000	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		**Persentase ASN yang terpenuhi Administrasi Kepegawaiannya dalam Setahun**	**100%**	**10.000.000**	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**		**Persentase ASN yang terpenuhi Administrasi Kepegawaiannya dalam Setahun**	**100%**	**12.075.000**	
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	10.000.000	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	12.075.000	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam Setahun**	**100%**	**47.291.000**	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam Setahun**	**100%**	**44.066.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.291.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.051.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediaan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediaan	1 Paket	1.015.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	25.000.000	
	PENGADAAN BARANG MILIK DARAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan dalam Setahun**	**100%**	**225.000.000**	**PENGADAAN BARANG MILIK DARAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan dalam Setahun**	**100%**	**226.141.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional /Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional /Lapangan yang Disediakan			
	Pengadaan Mebel	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	10.141.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	16.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	200.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun**	**100%**	**69.709.000**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Setahun**	**100%**	**70.101.360**	
	Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	28.009.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	26.961.360,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	29.700.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	31.140.000	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara Dalam Setahun**	**100%**	**12.000.000**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara Dalam Setahun**	**100%**	**10.972.000**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	10.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	9.972.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi yang dipelihara			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi yang dipelihara			
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan dalam Kategori Minimal Baik**	64,28%	**100.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Aspek Penilaian IKM Kecamatan dalam Kategori Minimal Baik**	64,28%	**76.075.000**	
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Kecamatan sesuai Standar	90%				**Persentase Penyelenggaraan Urusan Kecamatan sesuai Standar**	90%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**Persentase Penyelenggaraan Layanan Administrasi Sesuai Standar**	**100%**	**80.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Persentase Penyelenggaraan Layanan Administrasi Sesuai Standar**	**100%**	**60.000.000**	
	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	14 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	14 Laporan	60.000.000	
			Jumlah Dokumen IKM Desa yang disusun	14 dokumen				Jumlah Dokumen IKM Desa yang disusun	14 dokumen		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Persentase Fasilitasi Kegiatan Kesos yang Diselenggarakan Tepat Waktu**	**100%**	**20.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Persentase Fasilitasi Kegiatan Kesos yang Diselenggarakan Tepat Waktu**	**100%**	**16.075.000**	
			Persentase Laporan Hasil Fasilitasi Kegiatan Kesos di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	**100%**				**Persentase Laporan Hasil Fasilitasi Kegiatan Kesos di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti**	**100%**		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14 Laporan	16.075.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Desa yanng menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan**	90%	**24.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Desa yanng menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan**	90%	**22.962.500**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Persentase Laporan Hasil Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Ditindaklanjuti**	**85,71%**	**24.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Laporan Hasil Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Ditindaklanjuti**	**85,71%**	**22.962.500**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	24.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	22.962.500	
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Pemerintahan Desa yang Tata Kelola Pemerintahan Baik**	**85,71%**	**125.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Pemerintahan Desa yang Tata Kelola Pemerintahan Baik**	**85,71%**	**153.331.000**	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase dokumen SOP Pelayanan Desa yang disusun**	**100%**	125.000.000	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase dokumen SOP Pelayanan Desa yang disusun**	**100%**	153.331.000	
			Persentase peserta sosialisasi tata pemerintahan desa yang sangat paham terhadap materi sosialisasi	**90%**				**Persentase peserta sosialisasi tata pemerintahan desa yang sangat paham terhadap materi sosialisasi**	**90%**		
			Persentase laporan hasil fasilitasi pergantian perangkat desa yang di tindaklanjuti	**100%**				**Persentase laporan hasil fasilitasi pergantian perangkat desa yang di tindaklanjuti**	**100%**		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase laporan hasil fasilitasi LPPDes yang ditindak lanjuti	**100%**				**Persentase laporan hasil fasilitasi LPPDes yang ditindak lanjuti**	**100%**		
			Persentase laporan kegiatan pelaksanaan Musdes yang ditindaklanjuti	**100%**				**Persentase laporan kegiatan pelaksanaan Musdes yang ditindaklanjuti**	**100%**		
			Persentase laporan hasil Musrenbangcam yang di tindaklanjuti	**90%**				**Persentase laporan hasil Musrenbangcam yang di tindaklanjuti**	**90%**		
			Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi RKPDes dan DURKPDes	**100%**				**Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi RKPDes dan DURKPDes**	**100%**		
			Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi APBDes	**100%**				**Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi APBDes**	**100%**		
			Persentase laporan hasil koordinasi Forpimcam yang ditindaklanjuti	**90%**				**Persentase laporan hasil koordinasi Forpimcam yang ditindaklanjuti**	**90%**		
			Persentase peserta Paskibraka yang difasilitasi sampai dengan pelaksanaan Upacara HUT RI	**90%**				**Persentase peserta Paskibraka yang difasilitasi sampai dengan pelaksanaan Upacara HUT RI**	**90%**		
			Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Disusun Tepat Waktu	**85,71%**				**Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Disusun Tepat Waktu**	**85,71%**		
			Persentase Pemerintah Desa yang Memiliki Aparatur Desa Bersertifikat > 70%	**85,71%**				**Persentase Pemerintah Desa yang Memiliki Aparatur Desa Bersertifikat > 70%**	**85,71%**		
			Persentase Pemerintah Desa yang Tidak Memiliki Temuan Keuangan	**85,71%**				**Persentase Pemerintah Desa yang Tidak Memiliki Temuan Keuangan**	**85,71%**		
			Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	**85,71%**				**Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani**	**85,71%**		
			Persentase Pemerintah Desa yang Capaian Kinerja RPJMDes yang Tercapai	**85,71%**				**Persentase Pemerintah Desa yang Capaian Kinerja RPJMDes yang Tercapai**	**85,71%**		
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturaan Kepala Desa	14 dokumen	15.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturaan Kepala Desa	14 dokumen	19.800.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 dokumen	30.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 dokumen	70.350.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 dokumen	30.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 dokumen	22.131.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	14 dokumen	50.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Ngawi Kec. Kwadungan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	14 dokumen	41.050.000	
	Jumlah				**3.674.068.936,00**	**Jumlah**				**3.674.068.936,00**	

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN NGAWI

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KWADUNGAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	#BP Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Lele Sistem Bioflok dengan Kolam Terpal	Banget	Bidang Perekonomian	15 paket	
2	#BKD Pembangunan sarana/prasarana wisata Milik Desa	Budug		1 paket taman bermain, 1 paket taman olah raga	
3	#BKD Pembangunan sarana/prasarana Olahraga Milik Desa	Karangsono		342m x 2m x 0.6m	
4	#BP Bantuan Ternak Sapi Potong	Kendung		1 paket	
5	#BP Bantuan Benih Padi	Mojomanis		1.650 kg	
6	#BKD Pembangunan sarana/prasarana Olahraga Milik Desa	Pojok		1 pkaet	
7	#BK Bantuan gabah untuk isi lumbung	Tirak		20 ton	
8	#BKD Pembangunan Jalan milik Desa	Banget	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	415m x 3m	
9	#BKD Pembangunan Prasarana Jalan Desa milik Desa	Budug		750 m	
10	#BKD Pembangunan Jalan milik Desa	Jenangan		500m x2,8m	
11	#BKD Pembangunan Jalan milik Desa	Karangsono		270m x 3,2m x 0,6m	
12	#BP Jalan Usaha Tani	Kendung		1 paket	
13	#BP Jalan Usaha Tani	Kwadungan		315m x 3m	
14	#BKD Pembangunan Jembatan milik Desa	Mojomanis		300 m2	
15	#BKD Pembangunan Jalan milik Desa	Pojok		1 paket	
16	#BKD Pembangunan Jembatan milik Desa	Purwosari		4m x 12m	
17	#BKD Pembangunan Jalan milik Desa	Simo		470m x 3,2m	
18	#BKD Pembangunan Prasarana Jalan Desa milik Desa	Sumengko		110 m	
19	#BP Jalan Usaha Tani	Tirak		800 m2	
20	#BKD Pembangunan Jembatan milik Desa	Warukkalong		3m x 12m	
21	#BK Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah	Karangsono	Bidang Pemerintal	1 paket	
22	#BP Pengadaan APE Luar Ruangan	Banget		1 paket	
23	#BP Pengadaan APE Luar Ruangan	Jenangan		1 unit	
24	#BP Pengadaan APE Luar Ruangan	Mojomanis		1 paket	
25	#BP Pengadaan APE Luar Ruangan	Simo		1 paket	

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	82,80
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Pemerintah Desa Dengan Nilai IKM > 80	64,28
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	83,80

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Kwadungan Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Ngawi

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KWADUNGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KWADUNGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KECAMATAN KWADUNGAN								3.674.068.936,00					4.229.439.647,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.674.068.936,00					4.229.439.647,00
7	01				KECAMATAN								3.674.068.936,00					4.229.439.647,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG								3.674.068.936,00					4.229.439.647,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								9.950.000,00					10.500.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	9 Dokumen	100 %	4.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	1 Dokumen	100 %	1.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	1 Dokumen	100 %	1.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	1 Dokumen	100 %	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	1 Dokumen	100 %	1.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.250.000,00

7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	7 Laporan	100 %	1.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1.500.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.048.395.076,00					2.855.803.593,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	840 Orang/bulan	100 %	3.044.995.076,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/bulan	2.846.803.593,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	1 Laporan	100 %	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	48 Laporan	100 %	2.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48 Laporan	4.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								12.075.000,00					27.000.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	90 Paket	100 %	12.075.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	27.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								44.066.000,00					60.250.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	1 Paket	100 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	1 Paket	100 %	12.051.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Ngawi	100 %	1 Paket	100 %	1.015.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.000.000,00

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	1 Paket	100 %	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.500.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	12 Dokumen	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.750.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	30 Laporan	100 %	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	14.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								226.141.000,00					208.000.000,00
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	1 Unit	100 %	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	7 Unit	100 %	10.141.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	35.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	7 Unit	100 %	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	30.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	1 Unit	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.000.000,00
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	1 Unit	100 %	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								70.101.360,00					96.681.054,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	0 Laporan	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	60 Laporan	100 %	26.961.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	29.681.054,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	12 Laporan	100 %	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	12 Laporan	100 %	31.140.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								10.972.000,00					28.500.000,00
7	01	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	6 Unit	100 %	9.972.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit	13.500.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	4 Unit	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	5.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	100 %	1 Unit	100 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								60.000.000,00					316.705.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								60.000.000,00					194.205.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase laporan hasil fasilitasi kegiatan kesos di wilayan kecamatan yang ditindaklanjuti	Kab. Ngawi, Kwadungan, Semua Kel/Desa	87,50 %	14 Laporan	90 %	60.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	194.205.000,00

7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								16.075.000,00					122.500.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
						Persentase Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Sesuai Standar Persentase aspek	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Presentase laporan hasil fasilitasi kegiatan kesos di wilayan kecamatan yang ditindaklanjuti	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	85,71 % 87,50 %	14 Laporan	90 %	16.075.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14 Laporan	122.500.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								22.962.500,00					140.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								22.962.500,00					140.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	91,66 %	14 Laporan	14 Laporan	22.962.500,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	140.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								153.331.000,00					486.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								153.331.000,00					486.000.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan													
						Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik" Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Disusun Tepat Waktu Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persentase Pemerintah Desa yang Capaian Kinerja RPJMDes yang Tercapai Persentase Pemerintah Desa yang Memiliki Aparatur Desa Bersertifikat > 70% Persentase Pemerintah Desa yang Tidak Memiliki Temuan Keuangan	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	85,71 % 91,66 %	14 Dokumen	85.71 % 85.71 % 85.71 % 85.71 % 85.71 %	19.800.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	80.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik" Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Disusun Tepat Waktu Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persentase Pemerintah Desa yang Capaian Kinerja RPJMDes yang Tercapai Persentase Pemerintah Desa yang Memiliki Aparatur Desa Bersertifikat > 70% Persentase Pemerintah Desa yang Tidak Memiliki Temuan Keuangan	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	85,71 % 91,66 %	14 Dokumen	85.71 % 85.71 % 85.71 % 85.71 % 85.71 %	70.350.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	156.000.000,00

7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
						Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik" Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Disusun Tepat Waktu Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persentase Pemerintah Desa yang Capaian Kinerja RPJMDes yang Tercapai Persentase Pemerintah Desa yang Memiliki Aparatur Desa Bersertifikat > 70% Persentase Pemerintah Desa yang Tidak Memiliki Temuan Keuangan	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	85,71 % 91,66 %	14 Dokumen	85.71 % 85.71 % 85.71 % 85.71 % 85.71 %	22.131.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 Dokumen	150.000.000,00
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												
						Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik" Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Disusun Tepat Waktu Persentase Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persentase Pemerintah Desa yang Capaian Kinerja RPJMDes yang Tercapai Persentase Pemerintah Desa yang Memiliki Aparatur Desa Bersertifikat > 70% Persentase Pemerintah Desa yang Tidak Memiliki Temuan Keuangan	Kab. Ngawi, Kwadungan, Kwadungan	85,71 % 91,66 %	14 Dokumen	85.71 % 85.71 % 85.71 % 85.71 % 85.71 %	41.050.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 Dokumen	100.000.000,00
											TOTAL	**3.674.068.936,00**					**4.229.439.647,00**

3674068936

0